

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan tindakan hukum yang disyaria'tkan oleh Allah SWT. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela untuk memberikan sebagian harta kekayaan, dan menyedekahkan manfaatkan untuk kepentingan umum dengan maksud memperoleh pahala dari Allah SWT. Ajaran Islam menganjurkan agar ada lembaga yang digunakan seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Wakaf merupakan salah satu lembaga Hukum Islam yang mempunyai titik temu secara kongkrit dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, karenanya sangat menarik untuk menelaah lebih lanjut masalah ini dengan menelusuri kenyataan atau praktek yang terjadi.¹

Di Indonesia, Islam merupakan agama yang banyak penganutnya. Mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu kesejahteraan sosial, salah satunya adalah wakaf. Dalam Islam wakaf termasuk kategori ibadah kemasyarakatan dan hukumnya sunnah, amalan wakaf merupakan amalan yang besar karena amalan ini tidak dapat berhenti atau putus pahalanya bila orang tersebut telah meninggal dunia. Maka amalan wakaf akan terus mengalir pahalanya dan tetap diterima oleh muwakif walaupun ia telah meninggal.² Dalam Al-Qur'an pun di jelaskan:

¹ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 7

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas- Asas Mu'amalah dalam Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), h. 40

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al- Baqarah : 267)³

Secara historis, wakaf telah dikenal dalam Islam sejak Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah, disyaria’kan pada tahun ke- 2 Hijriah. Adapun mengenai kapan wakaf itu mulai dipraktikan, terdapat perbedaan pendapat.⁴

Sebagaimana yang dikutip dalam kitab “*Maghazi Al- Waqidi*” dalam buku yang diterbitkan Departemen Agama RI, bahwa sedekah yang berupa wakaf pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa sebidang tanah yang pernah diwakafkan beliau untuk masjid. Kemudian wakaf dipraktikan oleh sahabat Umar berupa tanah di Khaibar, kemudian disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya. Selanjutnya disusul oleh para sahabat Rasulullah SAW lainnya.⁵

Amalan wakaf ini kemudian dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, termasuk oleh umat Islam di Indonesia sebagai amal ibadah kepada Allah SWT. Di samping itu jumlah wakaf dan penggunaannya tidak terbatas kepada bangunan ibadah atau tempat kegiatan

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, (Bandung; Diponogoro, 2000), h. 49

⁴ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Qudus:Darul Ulum Press, 1994), h. 26

⁵ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007) h. 5-6

agama saja, tapi diperuntukan bagi kepentingan kemanusiaan dan kepentingan umum. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa pelaksanaan wakaf di Indonesia mengadopsi sistem hukum dalam ajaran Islam, namun pada pelaksanaannya kemudian wakaf seolah-olah merupakan kesepakatan ahli hukum dan budaya bahwa perwakafan adalah masalah hukum adat Indonesia, sehingga tidak jarang membangun masjid, pesantren dan sekolah-sekolah dilakukakn secara bersama dan gotong royong.

Selanjutnya dalam hukum Indonesia, wakaf merupakan salah satu kekuasaan absolut Pengadilan Agama, hukum wakaf mendapat perhatian dari para penyelenggara negara baik sebelum atau sesudah kemerdekaan. Terbukti dengan adanya kesungguhan bangsa Indonesia untuk mengatur perwakafan ini yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Diantaranya yaitu, Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah, Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Berangkat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan bagian dari semangat memperbarui dan memperluas cakupan obyek wakaf dan pengelolannya agar mendatangkan manfaat yang maksimum. Dilihat dari materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, undang-undang wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundangan-undangan wakaf yang sudah ada dengan menambah materi baru

sebagai upaya pemberdayaan wakaf, yang salah satunya mengatur adanya perubahan status harta benda wakaf.

Perubahan status harta benda wakaf sering terjadi dan menimbulkan kontroversi bahkan berakres terhadap munculnya konflik sosial di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat tukar ganti benda atau obyek yang secara hukum berstatus wakaf. Tukar ganti wakaf sudah masuk dalam perdebatan ulama madzhab, dan masuk dalam buku-buku fiqih sejak abad pertengahan. Para ulama berbeda pendapat mengenai tukar ganti wakaf. Misalnya, Imam Syafi'i tidak memperbolehkan adanya tukar ganti wakaf terutama wakaf masjid meskipun bangunan masjid tersebut sudah roboh secara mutlak tidak dapat dijual atau ditukargantikan, tapi ada Imam Madzhab lain seperti Imam Hambali yang membolehkan tukar ganti tanah wakaf masjid asalkan wakaf tersebut kembali seperti semula atau lebih baik dari sebelumnya.⁶ Namun di Indonesia realitasnya mayoritas bermadzhab Syafi'i, semakin lama praktek tukar ganti wakaf semakin banyak dilakukan dan beberapa menjadi kontroversial, bahkan berakres konflik.⁷

Tukar ganti yaitu menukar benda dengan suatu benda lainnya, baik cara benda itu dijual terlebih dahulu kemudian diganti dengan barang yang lain, atau dipindahkan lokasinya. Praktik wakaf di Indonesia kebanyakan adalah wakaf tanah milik. Salah satu diantaranya adalah tanah wakaf masjid yang di alihfungsikan. Inilah yang menjadi obyek pembahasan. Mengenai perwakafan tanah milik yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1997 berdasarkan unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf pada pasal 3 yakni:

⁶ Amelia Fauzia, 'Tukar ganti Wakaf Perspektif Sosiologis, <http://www.bwi.or.id>, di upload (1 Oktober 2018, 20.00 WIB)

⁷ Abdullah Ubaid Matraji, "Membangkitkan Perwakafan di Indonesia," <http://www.PadangEkspres.co.id>, di upload (1 Oktober 2018, 20.00 WIB)

“Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain, dapat mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku; dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak atas namanya yang sah menurut hukum”. Maka pasal 4 menyatakan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala ikatan, pembebanan, sitaan, dan perkara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf BAB 1 Pasal 1 Ayat (1) menegaskan bahwa: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syai’ah”. Dengan demikian fungsi wakaf sesuai Undang-Undang dalam Pasal 5, bahwa: “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Oleh karena itu, agar upaya pelaksanaan wakaf di Indonesia dapat berjalan tertib dan sistematis maka pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama mengembangkan lembaga wakaf dan memberdayakan potensi wakaf sehingga akan berdampak positif terhadap kehidupan sosial dan ekonomis umat Islam.⁸ Dan adanya Pernyataan tentang Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 yang terdapat dalam BAB 1, Bagian Kedelapan Tentang Peruntukan Harta Benda Wakaf, Pasal

⁸ Ramin, “*Paradigma Baru Wakaf*” (online), Tersedia: <http://bdkbandungkemenag.go.id/jurnal/255-paradigma-baru-wakaf> di upload (30 September 2018, 20.18 WIB)

22, huruf (d) dan (e) yaitu: Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi; dan/atau

Berdasarkan undang-undang tersebut kiranya dapat dipahami bahwa cara yang digunakan adalah cara khusus sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, biasanya bila seseorang akan mewakafkan tanah miliknya, wakif menunjuk nazir untuk menyelesaikan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pelaksanaan wakaf. Walaupun tujuan wakaf digunakan untuk kepentingan umum serta kesejahteraan masyarakat dalam tukar ganti tanah wakaf ditinjau dari hukum Islam bahwa “Tanah wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak pula dihibahkan”. Dan disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 40 bahwa tanah wakaf tidak dapat dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Dan disambung dengan Pasal 41 kecuali untuk kepentingan umum dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Menurut pendapat ini wakaf tidak boleh dipejual belikan atau diubah. Konsepnya, hal ini jika terus dibiarkan akan memberikan dampak kontra antar masyarakat.

Seperti yang terjadi kota Purwakarta tepatnya di Kampung Babakan, Desa Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, disana terdapat tukar ganti tanah wakaf masjid Nahrurrohman seluas 100 m² blok 002 dan nomor sertifikat 10.07.07.06.1.00163 dengan 200 m² di blok 004 Nomor Sertifikat

10.07.11.01.1.01347 milik Alm. H.Eman Yunus di Kampung Babakancikao RT 010/ RW 004 Desa Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur untuk pembangunan trase stasiun kereta api cepat Jakarta-Bandung oleh salah satu PT yang memakan beberapa rumah warga termasuk tanah wakaf masjid. Sebagian bangunan yang akan dilintasi untuk proyek pembuatan rel kereta cepat sudah diratakan dan diganti rugi dengan uang yang setimpal kecuali tanah wakaf masjid tersebut. Menurut Bapak Dede Suminta pengurus masjid sekaligus nadzir dari tanah wakaf yang ada di Kampung Babakan Desa Cikaobandung Kabupaten Purwakarta, masjid tidak diizinkan oleh masyarakat untuk digusur karena masih banyak pertimbangan dan belum adanya surat izin tukar ganti tanah wakaf.⁹ Seperti yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 49 ayat (1) yaitu: “Perubahan status harta benda Wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan persetujuan BWI”.

Tanah wakaf yang ada di Kampung Babakan, Desa Cikaobandung, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta diwakafkan oleh pemiliknya yaitu Alm. Bapak Aja dengan tujuan kepentingan umum, untuk didirikannya sebuah masjid untuk masyarakat beribadah secara berjamaah, namun saat ini tanah wakaf yang diwakafkan akan ditukar gantikan menjadi jalan rel kereta cepat.

Terkait tukar ganti tanah wakaf yang ada di Kampung babakan, Desa Cikaobandung, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta peneliti juga

⁹ Wawancara dengan Nadzir Bapak Dede Suminta di desa Cikaobandung Kab. Purwakarta, (29 September 2018, 13.00 WIB).

melakukan wawancara kepada ketua RW kampung Babakan yaitu bapak Adang yang menyatakan bahwa; “Jika masjid tersebut digusur kegiatan peribadahan seperti sholat 5 waktu, sholat teraweh dan pengajian rutin setiap Selasa dan malam minggu akan terhambat karena jarak masjid dari kampung ke kampung yang lainnya cukup jauh sehingga tidak ada tempat lagi untuk melaksanakan beribadah berjamaah selain di masjid tersebut.”¹⁰

Masih banyak pertimbangan terkait tukar ganti tanah wakaf masjid di Desa Cikaobandung Kabupaten Purwakarta karena pihak PT. PSBI menginginkan masjid segera bisa digusur namun masyarakat tidak mengizinkan sebelum adanya masjid pengganti yang baru bagi masyarakat untuk beribadah dan belum adanya izin ruihslag atau tukar ganti tanah wakaf sebagaimana tertata dalam peraturan pemerintah maupun Undang-Undang perwakafan. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam dan hukum yang ada di Indonesia yang memperbolehkan tukar ganti tanah wakaf

Berdasarkan latar belakang di atas, timbul ketertarikan peneliti untuk meneliti lebih lanjut terhadap permasalahan yang timbul akibat dari tukar ganti tanah wakaf ini, yang selanjutnya akan diuraikan dalam skripsi yang berjudul “Tukar Ganti Tanah Wakaf di Desa Cikaobandung Kabupaten Purwakarta menurut Perundang-Undangan.”

¹⁰ Wawancara dengan Ketua RW bapak Adang di Desa Cikaobandung Kabupaten Purwakarta, (29 September 2018, 16.30 WIB).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan urutan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang tukar ganti tanah wakaf Masjid menjadi jalan rel kereta cepat di Kampung Babakan, Desa Cikaobandung, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta?
2. Bagaimana prosedur tukar ganti tanah wakaf Masjid di desa Cikaobandung Kecamatan Kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tentang tanah wakaf Masjid yang ditukar gantikan menjadi jalan rel kereta cepat di Kampung Babakan, Desa Cikaobandung, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran hasil yang diinginkan dalam penelitian. Kegunaan penelitian adalah manfaat yang diambil dari hasil penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui latar belakang tukar ganti tanah wakaf Masjid menjadi jalan rel kereta cepat di Kampung Babakan, Desa Cikaobandung, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta?
- b. Bagaimana prosedur tukar ganti tanah wakaf Masjid di desa Cikaobandung Kecamatan Kabupaten Purwakarta?
- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tentang tanah wakaf Masjid yang ditukar gantikan menjadi jalan rel

kereta cepat di Kampung Babakan, Desa Cikaobandung, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta?

2. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- a. Secara akademis, penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem perwakafan yang terus berkembang di masyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik perwakafan sesuai dengan hukum Islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung dan diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan kepada pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu di antaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Tatang Setiawan Ade Saputra dengan judul *“Penjualan Tanah Wakaf (Kasus di Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Dusun Nanggerang Desa Gereba Kecamatan Ciamis)*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, (1) latar belakang, sebab dan dasar hukum penjualan tanah wakaf, (2) pengawasan yang dilakukan oleh KUA, (3) relevansi penjualan tanah wakaf dengan PP No. 28 Tahun 1997 dan KHI. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa harta yang sudah diwakafkan itu

berpindah kepemilikan menjadi hak Allah, dan pemanfaatannya untuk *mauquf alaih*, dengan demikian, kepemilikan terlepas dari pemilik semula (wakif) dan harta tersebut tidak boleh dijual, diwariskan atau dihibahkan. Data yang ditemukan di lapangan adalah data hasil penelitian tentang proses perwakafan dari wakif (Bapak Tb) dan data penjualan tanah wakaf tersebut. Pada Tahun 1991 Bapak Tb mewakafkan tanah kebunnya kepada DKM dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi dan mendapat akta dengan Nomor: 10.19.08.07.1.00097, dan pada tahun 1992 Bapak Tb meninggal dunia. Pada Tahun 1993 DKM memprakarsai renovasi masjid dengan dana swadaya dari masyarakat. Tetapi ketika renovasi selesai sekitar 75% renovasi terhenti karena kurang dana, maka untuk mencukupinya DKM menjual tanah wakaf dari Bapak Tb tanpa prosedur yang diharuskan dalam PP No. 28 Tahun 1997 dan KHI. Dengan alasan kekurangan dana dalam renovasi masjid jami, DKM menjual tanah wakaf dari Bapak Tb dengan tidak memenuhi prosedur yang diharuskan dalam PP No. 28 Tahun 1997 dan KHI tanpa adanya musyawarah dengan masyarakat ahli waris dari wakif.

2. Skripsi yang disusun oleh Euis Sumartini dengan judul “*Perubahan Status Tanah Hibah Menjadi Tanah Wakaf Ahli di Desa Sanding Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) konsep wakaf ahli menurut Fiqih dan Qanun, (2) pelaksanaan tanah hibah menjadi tanah wakaf ahli di desa Sanding kecamatan Malangbong, (3) tinjauan Fiqih dan Qanun tentang perubahan status tanah hibah menjadi wakaf ahli di desa tersebut. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa

wakaf adalah perbuatan hukum seseorang yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya, dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk keperluan ibadat atau kepentingan lainnya, yang sesuai dengan ajaran Islam. Lembaga perwakafan sebagai salah satu instusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi, merupakan perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Oleh karena itu, wakaf harus didayagunakan secara optimal dengan managemen yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) wakaf ahli dalam hukum fiqih dan Qanun adalah salah satu perbuatan hukum yang berbentuk penahanan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah yang penerima manfaatnya itu adalah anak cucu atau kaum kerabat, (2) Perubahan status tanah hibah menjadi wakaf ahli di Desa Sanding telah sesuai dengan aturan yang ada dan manfaatnya dapat dirasakan baik oleh keluarga penerima wakaf, maupun oleh masyarakat sekitarnya dalam bentuk makmurnya kehidupan beragama. Wakaf ahli tersebut sudah berlangsung sejak tahun 1999, dari H. Oman Abdurrahman kepada Ustadz Buchori Muslim, dan (3) Pelaksanaan perubahan status tanah hibah menjadi tanah wakaf ahli yang dilakuka oleh H. Oman Abdurrahman kepada Usradz Buchori Muslim adalah sah. Dilihat dari segi syarat benda yang diwakafkan, tanah itu sudah memenuhi syarat, yakni milik wakif sendiri dan benda itu manfaatnya bersifat kekal. Dilihat dari segi rukunnya juga sudah terpenuhi.

3. Skripsi yang disusun oleh Itep Shohibuddin dengan judul *“PENYERAHAN TANAH WAKAF TIDAK TERCATAT TERHADAP STATUS HUKUM DAN PEMANFAATANNYA (Studi Kasus atas Tanah Wakaf Masjid di Kampung*

Tambak Daya Desa Dano Kecamatan Leles Kabupaten Garut). Adapun penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum dan pemanfaatan benda wakaf dalam hukum Islam. Juga untuk mengetahui bagaimana proses penyerahan tanah wakaf masjid tidak tercatat di Kampung Tambak Baya dan sekaligus untuk mengetahui bagaimana implikasi penyerahan tanah wakaf masjid tidak tercatat di Kampung Tambak Baya, Desa Dano terhadap status hukum dan pemanfaatannya. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa wakaf adalah amal jariyah yang diharapkan pahalanya mengalir terus-menerus. Harta yang diwakafkan beralih dari kepemilikan pribadi kepada kepemilikan umat yang dikelola untuk sebesar-besar manfaatnya bagi umat. Harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Pelaksanaanya harus sesuai dengan syariat Islam dimana telah diatur dalam perundang-undangan. Pencatatan atau pendaftaran dimaksudkan untuk mendapat sertifikat sebagai bukti otentik perwakafan adalah suatu keharusan yang mesti dilaksanakan oleh semua pihak yang hendak berwakaf. Hal tersebut ditempuh guna memiliki kekuatan payung hukum yang jelas karena tanpanya berpotensi menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berwakaf adalah perbuatan hukum sehingga mematuhi perundangan mengenai perwakafan itu diwajibkan demi tertib administrasi dan melindungi status harta benda wakaf. Proses pelaksanaan perwakafan di Kampung Tambak Baya saat ini masih dilaksanakan dengan cara tradisional. Secara garis besar perwakafan dilakukan atas dasar saling percaya dimana ikrar dilaksanakan secara lisan dan tulisan (dibubuhi tanda

tangann di atas materai) dengan dihadiri beberapa saksi namun tidak pernah didaftarkan ke KUA atau pihak terkait yang mewenangi tentang wakaf. Perwakafan yang tidak tercatat atau tidak terdaftar merupakan suatu perbuatan yang cacat hukum. Implikasinya adalah bahwa perwakafannya tidak memiliki status hukum yang kuat sehingga dapat dengan mudah digugat kapan pun dan oleh siapapun. Kemudian pengelolaan dan pemanfaatannya akan menimbulkan kekacauan sehingga akan merugikan banyak pihak.

Berdasarkan penelitian di atas semuanya membahas permasalahan tentang wakaf seperti penjualan tanah wakaf, wakaf yang tidak tercatat dan tanah hibah yang menjadi tanah wakaf.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Imam Suhadi, wakaf menurut Islam adalah pemisahan suatu benda seseorang yang disahkan dan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhai Allah SWT, sehingga benda-benda tersebut tidak boleh dihutangkan, dikurangi, atau dilenyapkan.¹¹

Pengertian juga dirumuskan dalam ketentuan Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama.¹²

¹¹ Imam Suhadi. *Hukum Wakaf di Indoneia*. Yogyakarta: Dua Dimensi.1985. H-3

¹² Rachmadi Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009. H-66

Tukar ganti wakaf dalam istilah fikih disebut *istibdal al-istibdal*, diartikan sebagai penjualan barang wakaf untuk dibeli barang lain sebagai wakaf penggantinya. Ada yang mengartikan bahwa *al-istibdal* adalah mengeluarkan suatu barang dari status wakaf, dan menggantikannya dengan barang lain (*al-ibdal*), baik yang sama kegunaannya atau tidak, seperti menukar wakaf yang berupa tanah pertanian dengan barang yang lain berupa tanah untuk bangunan. Ada juga yang mengartikan sama antara *al-Istibdal* dan *al-Ibdal*.¹³

Para fuqoha membolehkan mengganti barang wakaf, menjualnya karena darurat dengan syarat-syarat, batasan-batasan dan perincian masing-masing.¹⁴ Dalam hal ini, ulama fikih berbeda pendapat tentang menyikapi boleh atau tidaknya *istibdal* atau *ibdal*, ada yang mempersulit dan ada yang mempermudah, bahkan ada yang pada dasarnya melarang *istibdal* atau *ibdal* kecuali dalam situasi pengecualian (*ahwal istisnaiyah*) yang jarang terjadi. Bagi mereka yang menitik beratkan pada prinsip keabadian mengatakan, bahwa menjaga kelestarian atau keberadaan barang wakaf itu merupakan keniscayaan kapan dan dimana saja, tidak boleh dijual dengan alasan apapun, apalagi kalau barang wakaf tersebut berupa masjid, namun dalam madzhab Hanabiyah masjid dapat ditukar bahkan dibeli dengan wakaf yang baru sebagai penggantinya, dengan alasan darurat seperti dibutuhkan untuk jalan lalu-lintas umum, untuk perluasan kuburan dan lain sebagainya.¹⁵

Pada Pasal 49 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang

¹³ Colil Nafis, M. *Peran Badan Wakaf di Indonesia dalam Ruislag Tanah Wakaf*. 2010 (online). Tersedia: <http://www.nafisinstute.blogspot.com>. (1 Oktober 2018. Jam 14.36 WIB).

¹⁴ Wahbah Az-zuaili; Penerjemah, Abdul Hayyie Al-kattani, dkk. *Fikih Islam Wa Adilatuhu Jilid 10*. Jakarta: Gema Insani. 2011. H-323.

¹⁵ Thalhan Hasan. *Istibdal Harta Benda Wakaf*, Al-Awakaf, Jurnal Wakaf dan Ekomomi Islam Volume II, Jakarta; Badan Wakaf Indonesia. 2009. h-4

Pelaksanaan Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri atas persetujuan BWI dan tukar ganti tanah wakaf dapat dilakukan dengan syarat untuk kepentingan umum, harta benda wakaf tidak sesuai lagi dengan ikrar wakaf dan untuk keperluan keagamaan yang secara langsung dan mendadak.¹⁶

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 41 memberikan legalitas terhadap tukar menukar benda wakaf setelah terlebih dahulu memberikan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia dua alasan, yaitu karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan demi kepentingan umum. Secara substansial, benda-benda wakaf boleh diberdayakan secara optimal untuk kepentingan umum dengan cara tukar menukar. Keberadaan peraturan tersebut merupakan upaya pembaharuan paham yang sejak awal diyakini oleh mayoritas ulama dan masyarakat Indonesia yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i bahwa benda-benda wakaf tidak boleh diutak-atik, walaupun demi kepentingan manfaat sekalipun.¹⁷

Ketentuan mengenai mekanisme perubahan status harta benda wakaf juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 yang menjelaskan bahwa penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan tersebut.¹⁸

¹⁶ Sofyan Hasan, K.N. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya. Al-Ikhlâs.1995. h-97

¹⁷ Sumuran Hararap. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.2008. h-99

¹⁸ Thalhan Hasan. *Istibdal Harta Benda Wakaf*. Al-Awakaf, jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Volume II. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.2009 h-13

Hal serupa dijumpai pula dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 225 yang menyatakan:

1. Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf.
2. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan, karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif atau karena kepentingan umum.¹⁹

Dengan demikian, hukum asal perubahan atau pengalihan benda wakaf dalam perundang-undangan di Indonesia adalah dilarang, akan tetapi selama memenuhi syarat-syarat yang sebagaimana telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku, tetap memberikan peluang dibolehkannya melakukan perubahan atau pengalihan terhadap harta benda wakaf, meski dengan melalui prosedur dan proses yang panjang.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Membahas masalah-masalah dalam penelitian ini, diperlukan suatu pendekatan antropologi dalam memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan gambaran dari masalah tersebut secara jelas, tepat dan rinci. Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

¹⁹ Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung.: PT Citra Aditiya Bhakti.1994. h-170

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian, tujuan penelitian, dan kerangka berfikir. Disamping itu, setiap metode penelitian memiliki karakteristik masing-masing, baik yang berkenaan dengan tahapan kerja yang dibutuhkannya maupun kekuatan dan kelemahannya.²⁰

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif, yakni menggambarkan dan menganalisis data yang ada untuk memperoleh gambaran mengenai latar belakang dan prosedur tanah wakaf. Sehingga dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat menemukan tujuan penelitian ini, penelitian ini didasarkan pada kebutuhan peneliti terhadap objek penelitiannya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kampung Babakan Desa Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta. Saat ini lokasi tersebut sedang dilakukan pembuatan rel kereta cepat oleh salah satu PT yang menggusur sebagian pemukiman masyarakat termasuk tanah wakaf masjid.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.²¹

a. Data Primer

²⁰ Cik Hasan Bisri. *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT Raja Persindo Persada.2004. H-58.

²¹ Cik Hasan Bisri. *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT Raja Persindo Persada.2004. H-64

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, dengan cara wawancara terhadap responden yaitu pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta yang mengurus perwakafan dan *nadzir* wakaf.

b. Data Sekunder

Data sekunder data yang diambil dari buku, karya ilmiah, dokumen resmi, undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, dan literatur lain yang berkaitan dengan tukar ganti wakaf.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan²²

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang:

- a. Latar belakang terjadinya tukar ganti tanah wakaf
- b. Prosedur tukar ganti tanah wakaf
- c. Tukar ganti tanah wakaf menurut hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam hal ini,

²² Cik Hasan Bisri. *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT Raja Persindo Persada. 2004. H-63

peneliti melakukan penelitian secara langsung di tempat tukar ganti wakaf sedang berlangsung.

b. Wawancara

Pengalihan data dilakukan dengan cara wawancara atau pengamatan terlibat, dengan merujuk kepada fokus dan tujuan penelitian.²³ Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara terhadap pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, *nadzir* tanah wakaf masjid dan masyarakat Kampung Babakan Desa Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.

c. Studi Pustaka

Pengumpulan data dan informasi tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Cara pengumpulan data ini digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan teori-teori atau ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini.

6. Analisi Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu teknik analisis data, penulis mengumpulkan, mengelompokan, menganalisis dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan.
- b. Menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan.

²³ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal-384

- c. Mengelompokkan seluruh data sesuai dengan masalah yang diteliti.
- d. Membuat analisis terhadap data-data yang telah diperoleh dan menghubungkan dengan data teori yang dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- e. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah yang berlaku dalam penelitian.

